

PERAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN BERAS: STUDI PADA DINAS PANGAN DAERAH

THE ROLE OF THE TOMOHON CITY GOVERNMENT IN REALIZING RICE FOOD SOVEREIGNTY: A STUDY OF THE REGIONAL FOOD SERVICE

Marcelino G.P. Tolosang^{1,*}, Arwanto Harimas Ginting², Meliasta Hapri Tarigan³

¹ Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus Nomor 69, Kota Manado

^{2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jalan Ir. Soekarno Km 20, Jatinangor, Sumedang

* corresponding author: arwantoharimasmgingting@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari bumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah untuk dikonsumsi oleh manusia yang berupa makanan dan minum. Ketersediaan pangan merupakan hal yang sangat penting. Terutama ketersediaan beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat. Pemerintah Kota Tomohon memiliki peran untuk menjaga ketersediaan beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat melalui Dinas Pangan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan peran pemerintah sebagai regulator membentuk peraturan yang menjadi landasan hukum tetap dalam menjaga ketersediaan beras, peran dinamisator adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam menjaga ketersediaan beras melalui beberapa program seperti gelar pangan murah, kampung pangan dan peningkatan kapasitas petani dan peran fasilitator pemerintah memfasilitasi masyarakat petani seperti memberikan sarana dan prasarana modern seperti tractor dan mesin rontok padi serta pupuk kepada petani, selain itu peran para penyuluhan pertanian untuk memberikan intervensi secara langsung kepada petani untuk meningkatkan kualitas dan produksi padi.

Kata Kunci: Makanan; Ketersediaan Beras; Peran Pemerintah

ABSTRACT

Food is everything that comes from biological sources and water, whether processed or unprocessed for human consumption in the form of food and drink. Food availability is very important. Especially the availability of rice as the community's staple food. The Tomohon City Government has a role in maintaining the availability of rice as a staple food for the community through the Regional Food Service. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this research reveal the role of the government as a regulator in forming regulations which become a permanent legal basis for maintaining the availability of rice, the role of the dynamist is to encourage community participation to actively participate in maintaining the availability of rice through several programs such as cheap food programs, food villages and increasing the capacity of farmers and the role of facilitator The government facilitates the farming community, such as providing modern facilities and infrastructure such as tractors and rice shedding machines and fertilizer to farmers, apart from that, the role of agricultural extension workers is to provide direct intervention to farmers to improve the quality and production of rice.

Food; Rice Availability; Government Role. and fertilizer to farmers, apart from that, the role of agricultural extension workers is to provide direct intervention to farmers to improve the quality and production of rice.

Keywords: Food; Rice Availability; Government Role.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dijelaskan, pangan adalah Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan, atau minuman, bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Suharyanto, (2011) menyatakan ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu/rumah tangga dari produksi pangan nasional, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau di seluruh

wilayah Indonesia”. Kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi, hal ini merupakan bagian dari hak individu itu sendiri untuk menenuhi kebutuhannya. Selain itu, pemenuhan akan pangan yang tercukupi adalah komponen dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan serta sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di masyarakat.

Indonesia memiliki beberapa jenis bahan pangan (Hassan, 2014) yang dijadikan kebutuhan pokok dari masyarakat. Jenis bahan pangan di Indonesia yaitu, padi (beras), jagung, sorghum, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, singkong dan ubi jalar. Mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada jenis pangan utama yaitu beras. Jenis bahan pangan ini adalah jenis yang dapat ditemui dan kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia.

Tabel 1 Data Pangan Beras Nasional Tahun 2019-2022

Komoditas (Ton/Tahun)	2019	Tahun 2020	2021	2022
Beras Produksi	31.313.034,46	31.496.746,88	31.356.017	31.540.522
Konsumsi	28,93	29,37	30,04	30,2

Sumber: BPS Nasional 2022

Kota Tomohon merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota Tomohon, yang merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan memiliki tanah yang subur. Sumber daya yang melimpah ini didapatkan karena letak Kota Tomohon yang berada didataran tinggi, dan berada disekitar pegunungan vulkanik yang membuat tanah disekitarnya menjadi subur, dan sangat cocok untuk ditanami tanaman pangan. produksi padi

Kota Tomohon tahun 2019 adalah sebesar 1.100,77 ton. Tahun 2020 mengalami

penuruan menjadi 1.095,11 ton. Tahun 2021 produksi padi mengalami peningkatan yakni sebanyak 1.151,05 ton. Tahun 2022 produksi padi Kota Tomohon meningkat signifikan menjadi 1.649,82 ton. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dari 99.682 jiwa di tahun 2019, meningkat menjadi 101.151 jiwa di tahun 2022.

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang akan berpengaruh pada ketersediaan pangan di Kota Tomohon.

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah memiliki hubungan dengan meningkatnya alihfungsi lahan (Marhaeni & Yuliarmi, 2018; Prabowo et al., 2020; Syaifuddin et al., 2013). Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan akan stok beras akan meningkat (Chaireni et al., 2020). Hal ini karena konsumsi masyarakat terhadap beras akan ikut meningkat seiring bertumbuhnya penduduk. Kondisi ini tentu akan memicu terjadinya kerawanan pangan. Kerawanan pangan erat kaitannya dengan isu kemiskinan.

Pemerintah daerah (Abdullah, 2016; Hilmin et al., 2022) perlu untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui program-program dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan melalui kontrol dan pengendalian pangan (Rumawas et al., 2021). Dinas pangan Kota Tomohon selaku lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan pangan yang ada di Kota Tomohon, harus mampu untuk mengatasi masalah permasalahan ketersediaan pangan, agar dapat terwujud ketahanan pangan yang mampu mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan pembangunan daerah dan nasional.

Kerangka pemikiran merupakan garis besar gambaran secara umum yang dibuat oleh peneliti yang dituangkan dalam bentuk suatu diagram dan bagan yang menunjukkan alur pikir secara garis besar bagaimana proses suatu penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan rumusan masalah. Dengan adanya kerangka pemikiran dibuat agar dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan masalah penelitian secara logis dan mampu menjelaskan hubungan antar variabel.

Pemerintah daerah hadir dan berperan dalam berbagai bidang dengan tujuan memberikan kesejahteraan (*welfare*) kepada masyarakatnya (Fitzpatrick, 2011). Berbagai penelitian yang menunjukkan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana (Heryati, 2020), peran penting juga ditunjukkan di seluruh negara melalui

pemerintah daerah ketika dunia terkena pandemi covid-19 (Andiraharja, 2020). Peran lainnya dalam pengembangan pariwisata (Sentanu & Mahadiansar, 2020; Simamora & Sinaga, 2016) yang memungkinkan masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan. Untuk membangun daerah maka pemerintah berperan dalam pembangunan ekonomi daerah itu (Djadjuli, 2018), tidak melihat wilayah perkotaan saja namun peran pemintah daerah mencapai wilayah pesisir(Jamal, 2019) yang kebanyakan masyarakatnya adalah nelayan (Windasai et al., 2021).Tidak ketinggalan peran pemerintah daerah dalam menghadirkan kota layak anak (Roza & Arliman, 2018) mengingat Indonesia sedang berada pada bonus demografi. Peran lainnya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang didasarkan pada *good governance* (Aridhayandi, 2018), serta di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jombang(Putra, 2015)

Namun peran pemerintah yang cukup krusial perlu dilihat dalam mempertahankan kestabilan pangan masih jarang ditemui. Kondisi Indonesia perlu memperhatikan peran dari sisi pembuatan regulasi, sebagai dinamisator, memfasilitasi dan sebagai katalisator (Firdaus, 2020) sangatlah penting. Peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32),

1. Regulator berasal dari kata regulasi yang artinya peraturan. Peran pemerintah melalui Dinas Pangan sebagai regulator berarti pemerintah mempunyai peran untuk membuat peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme kegiatan yang menunjang untuk ketersediaan pangan beras
2. Dinamisator berarti pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam hal ini berarti adanya keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan atau program untuk

menjaga ketersediaan pangan beras.

3. Fasilitator berasal dari kata fasilitas. Fasilitas merupakan sarana atau prasarana yang dapat digunakan untuk memperlancar pelaksanaan suatu usaha atau untuk dapat mencapai target yang dituju. Fasilitator berarti pihak yang memberi atau menyediakan sarana atau prasarana tersebut, dapat berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menyokong lancarnya pelaksanaan kegiatan ketersediaan pangan agar dapat memenuhi sasaran kegiatan.

METODOLOGI

Bab Metodologi berisi seluruh materi, teknik analisis, sumber data dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian ini. Bab Metodologi berisi sekitar 10% – 20% dari keseluruhan isi tulisan. Prinsipnya adalah bahwa metodologi harus berisi semua hal yang terkait dengan penelitian ini sedetil mungkin agar penelitian ini dapat diulang oleh orang lain (*repeatable*). Fungsinya adalah jika orang lain ingin membuktikan hasil penelitian ini atau tidak percaya dengan hasil penelitian ini maka orang tersebut dapat mengulang penelitian ini dengan cara, data, bahan, dan teknik analisis yang sama persis dengan penelitian ini. Semakin detil sebuah informasi yang disajikan dalam metode penelitian, maka semakin karya tulis tersebut semakin baik. Sebaiknya pada Bab Metodologi tidak perlu ada sub judul – sub judul, kecuali memang sangat diperlukan. Jika diperlukan, maka pembagian sub judul adalah seperti di bawah ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Cresswell et al., (2019) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana

peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Karakteristik penelitian kualitatif (Harahap, 2020) adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang didapatkan berdasarkan dengan pengamatan peneliti yang diolah dan bukan data yang sekedar terlihat, terucap tetapi data yang mengandung makna didalamnya. Makna yang terdapat didalam data pasti ini berasal dari data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami berbagai fenomena berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain, secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikan dalam kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Leeming, 2018). Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian kepada objek, sekelompok manusia, kondisi, keadaan, suatu pemikiran yang terjadi dimasa sekarang. Adapun tujuan dari penulisan metode ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang ada dan hubungannya, yang disusun secara sistematik, dan akurat. (Nazir, 2013)

Dalam menggumpulkan data penelitian, peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dan dalam menguji validitas data menggunakan teknik triangulasi data (Rahardjo, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan berisi sekitar 50% – 60% dari keseluruhan isi tulisan. Cara penulisan pada Bab Hasil dan Pembahasan diserahkan sepenuhnya kepada penulis. Bisa saja pada bagian awal ditampilkan dulu seluruh hasil-hasil penelitian. Setiap hasil penelitian baik berupa grafik, gambar, dan sebagainya diinterpretasi/dijelaskan maknanya. Setelah seluruh hasil penelitian disajikan, barulah

tahap selanjutnya dilakukan pembahasan. Cara lain adalah setiap hasil penelitian dapat langsung dilakukan pembahasan. Kedua cara itu diperbolehkan dalam jurnal ini disesuaikan dengan kepentingan penulis.

Dalam melakukan pembahasan, sebisa mungkin setiap hasil penelitian dicari hubungannya dengan teori dan/atau penelitian orang lain baik dari jurnal-jurnal ilmiah maupun *textbooks*. Dalam melakukan pembahasan diperbolehkan juga untuk menyampaikan opini / pandangan penulis terhadap hasil kajian ini. Pada bagian akhir pembahasan disarankan untuk menyampaikan juga apa yang perlu selanjutnya dilakukan (*what next to do*) agar ini menjadi bahan kajian bagi peneliti lain. Sebaiknya pada Bab Hasil dan Pembahasan tidak perlu ada sub judul – sub judul, kecuali memang sangat diperlukan. Jika diperlukan, maka pembagian sub judul adalah seperti di bawah ini.

Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah bagian yang sangat penting. Menurut Ryaas Rasyid dalam (Labolo, 2010) pemerintah sebagai penggerak dan pelaksana di tengah masyarakat harus menyiapkan arah dan kebijakan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Dalam penelitian ini peran pemerintah melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, berperan sebagai regulator. Dalam penentuan kebijakan dan peraturan serta arah dan program yang dilaksanakan untuk menjaga ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Berdasarkan hasil data primer dan data sekunder yang ditemui di lapangan menunjukkan adanya upaya dari pemerintah dalam rangka untuk menjaga ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Dari hasil wawancara yang dilakukan, pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, berpatokan pada Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah. Dalam peraturan ini, terdapat tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, yaitu terdapat dalam pasal 135-140. Sedangkan dalam keterkaitan dengan tanggung jawab tugas dan fungsi untuk ketersediaan beras dalam hal ini berkaitan dengan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan terdapat pada pasal 137 pada huruf (a), (b), dan (c) yaitu berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Pasal dengan jelas memperlihatkan bagaimana peran pemerintah melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon.

Sesuai dengan wawancara dan pengamatanya yang dilakukan pada saat penelitian, ketersediaan beras juga merupakan bagian dari bidang distribusi dan cadangan pangan. Hal ini karena keterkaitan dengan ketersediaan beras melalui pasokan dan distribusi yang ada di Kota Tomohon. Dengan jelas diatur dalam pasal 138 huruf (a), (b), (h), (i), (y), dan (z). Pada Pasal 138 Huruf (a), (b), (h), (i), (y), dan (z) ini, peran pemerintah dalam hal distribusi dan cadangan pangan diatur. Berdasarkan pasal ini pemerintah melalui Dinas Pangan Daerah melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan, kebijakan, dan melakukan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan ketersediaan beras di Kota Tomohon sangat bergantung pada pasokan yang masuk di Kota Tomohon, dalam hal ini melalui para pedagang yang ada di pasar Kota Tomohon baik pasar tradisional maupun pasar modern. Begitu juga dengan cadangan beras pemerintah daerah, berdasarkan penelitian dilapangan, peraturan terkait dengan cadangan beras pemerintah daerah, saat ini masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon (DPRD). Peraturan terkait dengan cadangan beras pemerintah daerah ini perlu dibuat dalam rangka memberikan landasan hukum kepada pemerintah Kota Tomohon, terkait dengan pengelolaan cadangan beras

pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan tentang cadangan beras pemerintah daerah, pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan terakit dengan cadangan beras pemerintah daerah ini akan tertata dengan baik, serta sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan. Sehingga saat ini Dinas Pangan Daerah melalui bidang distribusi dan cadangan pangan terus mengawal penerbitan produk hukum ini, agar supaya apabila cadangan beras pemerintah daerah ini dibutuhkan, dapat segera disalurkan dan dimanfaatkan. Karena selama ini cadangan beras pemerintah daerah tidak pernah tersentuh atau digunakan karena dasar hukum terkait dengan penggunaannya juga belum ada.

Dinamisator

Menurut Ryaas Rasyid dalam (Labolo, 2010) pemerintah sebagai dinamisator adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Peran pemerintah sebagai dinamisator melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon adalah memberikan dorongan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon.

Dorongan dari pemerintah untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon terlihat dari kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Daerah. Program gelar pangan murah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon adalah salah satu bentuk program yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketersediaan beras. Dalam kegiatan ini masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang jauh dibawah harga pasar yang sudah di subsidi oleh pemerintah,

dan membeli dalam jumlah yang banyak untuk menjadikan stok pangan mandiri bagi masyarakat. Sehingga ketersediaan beras bisa terjaga melalui stok pangan mandiri masyarakat yang ada di keluarga masing-masing. Selain beras, dalam kegiatan gelar pangan ini juga menyediakan bahan pangan lainnya, seperti Cabai, dan Merica, serta bahan pangan lainnya.

Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan program Kampung Pangan. Salah satu program yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon. Melalui program kampung pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah dan bekerja sama dengan PKK di setiap kelurahan yang ada di Kota Tomohon, masyarakat bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Bahan pangan yang ditanam seperti sayur, Cabai, umbi-umbian dan sebagainya. Dalam kegiatan ini juga diharapkan bahwa masyarakat membiasakan diri dengan menanam dan mengkonsumsi bahan pangan pengganti, atau yang biasa disebut diversifikasi pangan, dimana masyarakat dapat mengkonsumsi bahan pangan pengganti pangan utama. Seperti menanam umbi-umbian untuk menggantikan ketergantungan masyarakat terhadap beras, agar supaya masyarakat tidak terlalu ketergantungan terhadap beras yang saat ini menjadi bahan pangan utama bagi masyarakat. Selain itu masyarakat juga bisa mengganti dengan menggunakan beras jagung untuk menggantikan dengan beras padi yang dikonsumsi masyarakat saat ini. Pemerintah Kota Tomohon berharap agar ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan yang didapatkan melalui jual beli di dalam pasar dapat beralih pada pangan yang dihasilkan dari kebun dan pertanian mandiri masyarakat melalui kampung pangan. Selain itu pemerintah juga berharap dapat menekan

inflasi akibat kenaikan bahan pangan pokok salah satunya adalah beras.

Dalam penelitian ini, pemerintah Kota Tomohon memiliki cadangan beras pemerintah daerah yang diperuntukkan apabila kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana non alam, bencana social dan keadaan darurat, yang memaksa pemerintah untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah daerah apabila stok beras dipasar maupun stok mandiri masyarakat sudah habis. Akan tetapi dalam cadangan beras pemerintah ini tidak pernah digunakan oleh pemerintah Kota Tomohon sejak cadangan beras pemerintah ini ada yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena kondisi Kota Tomohon tidak pernah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah. Dalam kurun waktu dari tahun 2014-2023 tidak pernah kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana non alam, bencana social dan keadaan darurat, yang harus membuat pemerintah mengeluarkan cadangan beras pemerintah, sehingga cadangan beras pemerintah Kota Tomohon sampai saat ini masih tetap tersimpan di gudang penyimpanan bulog. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk menjadi tempat penitipan atau penyimpanan cadangan beras pemerintah dengan perjanjian kerjasama sejak tahun 2019-2023. Bahkan ditahun 2024, pemerintah Kota Tomohon akan kembali bekerja sama dengan Bulog untuk menjadi tempat penyimpanan cadangan beras pemerintah daerah Kota Tomohon.

Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator menurut Ryaas Rasyid dalam(Labolo, 2010) adalah menciptakan kondisi kondusif dalam pelaksanaan pembangunan dan mampu menciptakan serta memberikan fasilitas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang aman, dan nyaman serta dapat menciptakan ketertiban.

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon menjalankan peran sebagai fasilitator dalam rangka untuk menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon. Pemerintah memberikan fasilitas berupa barang dan jasa untuk ketersediaan beras yang di Kota Tomohon khususnya kepada para petani padi yang ada di Kota Tomohon.

Dalam penelitian ini, pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada para petani padi yang ada di Kota Tomohon. Sarana dan Prasarana yang diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon berupa mesin traktor yang digunakan untuk membajak sawah. Dengan adanya mesin traktor ini membuat pekerjaan para petani dalam proses pembajakan sawah untuk persiapan menanam padi menjadi lebih singkat. Dari hasil wawancara dengan petani, disebutkan bahwa dengan alat pertanian modern ini, waktu penggerjaan yang dibutuhkan bisa sampai 2-3 hari saja, dibandingkan dengan menggunakan sarana tradisional menggunakan sapi sebagai alat bantu untuk membajak sawah yang memakan waktu lebih lama yaitu 4-5 hari.

Selain bantuan berupa traktor, pemerintah juga memberikan bantuan berupa mesin rontok padi yang digunakan oleh petani pada saat masa panen. Dulunya para petani yang ada di Kota Tomohon menggunakan alat bantu berupa batu yang diletakkan di tanah kemudian secara bergantian para petani memukulkan batang padi ke batu tersebut untuk memisahkan batang padi dengan biji padi. Dalam proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, hal ini tergantung pada jumlah panen dan jumlah pekerja yang ada. Semakin banyak jumlah panen yang dikumpulkan akan semakin lama juga proses untuk memisahkan batang padi dan bijinya. Ditambah lagi apabila para pekerja dengan jumlah yang sedikit, akan semakin membuat proses memisahkan batang padi dengan biji padi akan semakin lama. Sehingga proses panen akan memakan beberapa hari. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan alat atau mesin rontok yang menggunakan tenaga bensin ini,

akan semakin mempermudah pekerjaan para petani disaat musim panen. Dengan teknologi yang lebih modern ini, waktu panen yang tadinya bisa berlangsung beberapa hari, akan lebih efektif dan efisien dengan satu hari saja. Sehingga tidak akan menghambat pada proses selanjutnya yaitu proses penjemuran padi sebelum akhirnya masuk ke penggilingan padi untuk menghasilkan beras.

Teknologi yang lebih modern diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon untuk mempermudah para petani. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan berupa pupuk kepada para petani. Bantuan berupa pupuk ini diberikan untuk membantu para petani memaksimalkan hasil pertanian mereka. Disisi lain, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini juga memberikan dampak yang positif kepada para petani, dimana selain untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian mereka, tetapi juga membantu para petani dalam hal sisi finansial. Karena dengan adanya bantuan pemerintah ini, para petani tidak lagi susah payah untuk mencari pupuk dan membeli pupuk. Sehingga membantu mengurangi pengeluaran secara finansial kepada para petani.

Selain bantuan fisik berupa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon, sebagai bentuk peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah Kota Tomohon juga memberikan penyuluhan, pelatihan, monitoring, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyuluhan pertanian Kota Tomohon. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Peningkatan kapasitas petani juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon. Petani padi yang ada di Kota Tomohon terus dibekali dengan bimbingan dan pengarahan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mereka, agar menciptakan kualitas dan kuantitas hasil panen yang baik. Dalam upaya meningkatkan kapasitas petani padi, pemerintah memiliki para penyuluhan pertanian yang bertugas untuk terjun langsung kepada para masyarakat khususnya yang berprofesi

sebagai petani. Penyuluhan pertanian yang merupakan ujung tombak pemerintah kepada para petani menjadi bagian yang penting dalam peningkatan kapasitas petani. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para petani terus dilakukan oleh para penyuluhan pertanian agar menciptakan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang baik.

Para penyuluhan pertanian melakukan penyuluhan, pendampingan, dan monitoring kepada para petani secara berkala. Dalam kurun waktu 1 bulan, mereka dapat melakukan 2 kali intervensi kepada para petani dengan turun langsung ke para petani untuk melihat bagaimana proses pertanian. Selain itu jumlah para penyuluhan pertanian yang ada di Kota Tomohon yang saat ini berjumlah 65 orang diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil pertanian yang ada di Kota Tomohon.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon terbagi menjadi tiga, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan landasan hukum yang tetap bagi Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang pangan terlebih khusus menjaga ketersediaan beras yang juga merupakan bagian dari pangan pokok masyarakat. Selain itu, Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun peraturan terkait dengan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan beras pemerintah kota yang saat ini masih sementara di proses di DPRD Kota Tomohon. Peran sebagai dinamisator, dimana pemerintah melalui Dinas Pangan Daerah, menyiapkan arah pembangunan dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan dalam hal ini pembangunan pangan yang berkualitas baik

dan terjangkau untuk masyarakat. Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah sebagai dinamisator adalah menggelar kegiatan pangan murah bagi masyarakat, peningkatan kapasitas para petani padi, menjaga ketersediaan pasokan beras dan produksi beras di Kota Tomohon, bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam hal ini bulog untuk menyimpan cadangan beras pemerintah kota, menyiapkan cadangan beras pemerintah kota. Peran pemerintah yang ketiga yaitu sebagai fasilitator, dimana pemerintah memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk menunjang ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yaitu berupa bantuan alat pertanian modern untuk menunjang kegiatan pertanian agar lebih efisien dan efektif. Selain itu, pendampingan yang berikan oleh pemerintah melalui para penyuluhan pertanian membawa dampak yang positif bagi para petani yang ada di Kota Tomohon.

Ucapan Terimakasih

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan kesempatan dalam melaksanakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kota Tomohon sebagai lokasi penelitian para penulis serta penyediaan bahan dan ketersediaan waktu para informan yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota dan Masyarakat yang di Kota Tomohon.

REFERENSI

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–103.
- Andiraharja, D. G. (2020). Peran pemerintah daerah pada penanganan COVID-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 52–68.
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883–902.
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70–79.
- Cresswell, L., Hinch, R., & Cage, E. (2019). The experiences of peer relationships amongst autistic adolescents: A systematic review of the qualitative evidence. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 61, 45–60.
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Firdaus, R. (2020). *Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara*.
- Fitzpatrick, T. (2011). *Welfare Theory: An Introduction to the Theoretical Debates in Social Policy*. Palgrave Macmillan.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*.
- Hassan, Z. H. (2014). Aneka tepung berbasis bahan baku lokal sebagai sumber pangan fungsional dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal. *Jurnal Pangan*, 23(1), 93–107.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139–146.
- Hilmin, H., Noviani, D., & Nafisah, A. (2022). Kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan kurikulum merdeka. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 148–162.
- Jamal, F. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir. *Jurnal Hukum*, 2(1).

- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pembangunan*. Rajawali Pers.
- Leeming, D. (2018). The use of theory in qualitative research. *Journal of Human Lactation*, 34(4), 668–673.
- Marhaeni, A., & Yuliarmi, N. N. (2018). Pertumbuhan penduduk, konversi lahan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(1), 61–78.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Prabowo, R., Bambang, A. N., & Sudarno, S. (2020). Pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian. *Mediagro*, 16(2).
- Putra, T. G. (2015). Peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1).
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
- Rumawas, V. V, Nayooan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahsa Selatan(Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1, 1–12.
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah: Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1–20.
- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1), 79–96.
- Suharyanto, H. (2011). Ketahanan pangan. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 4(2), 186–194.
- Syaifuddin, Hamire, A., & Dahlan. (2013). Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Agrisistem*, 9 (2), 169–179.
- Windasai, W., Said, M. M., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 793–804.